

Nomor : B/2101/SM.01.00/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Persiapan Pengadaan ASN TA 2023**

10 September 2023

Yth.

Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat dan Daerah
di
Tempat

Dalam rangka persiapan Pengadaan ASN TA 2023 dan menyusuli surat Menteri PANRB Nomor B/1922/M.SM.01.00/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Hal: Tindak Lanjut Surat Keputusan Menteri PANRB Nomor 571 Tahun 2023, Instansi Pemerintah agar segera menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang mengurangi alokasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis yang terdampak optimalisasi agar segera bersurat ditandatangani oleh PPK atau PyB untuk menyampaikan formasi yang akan dikurangi melalui email: asdep2sdma@gmail.com.
2. Instansi Pemerintah yang tidak menyampaikan usulan pengurangan alokasi PPPK untuk Jabatan Fungsional Teknis sampai dengan tanggal 12 September 2023 dinyatakan tidak mengurangi formasi PPPK.
3. Instansi Pusat diberikan waktu untuk melakukan input formasi dan pengelompokan jabatan pada SSCASN paling lambat tanggal 12 September 2023.
4. Dalam hal Instansi Pusat tidak melakukan input formasi dan pengelompokan jabatan pada SSCASN sampai dengan batas waktu yang ditetapkan maka dinyatakan tidak melakukan pengelompokan jabatan dan data formasi akan disesuaikan dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 544 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Pusat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

ALEX DENNI
Deputi Bidang Sumber Daya Manusia
Aparatur
NIP. 196812272021211003

Tembusan

1. Menteri PANRB
2. Plt. Kepala BKN

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230910TNPF

CONTOH LAMPIRAN USULAN FORMASI YANG AKAN DIKURANGI**DAFTAR USULAN PENGURANGAN ALOKASI PPPK JF TEKNIS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI PPPK		UNIT PENEMPATAN
			SEMULA	MENJADI	
1.	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	S-1 SEMUA JURUSAN; D-IV SEMUA JURUSAN	3	1	GUBERNUR, DINAS TENAGA KERJA
2.	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 SEMUA JURUSAN; D-IV SEMUA JURUSAN	1	0	GUBERNUR, SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI ... , SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. ...
3.